

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

# **KELEMBAGAAN SUMBER DAYA BERSAMA DI BAWAH REZIM PERHUTANAN SOSIAL DI KECAMATAN KAHAYAN HILIR, INDONESIA**

**MOH. DJAUHARI**



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU PENGELOLAAN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2025**



## @Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kelembagaan Sumber Daya Bersama di Bawah Rezim Perhutanan Sosial di Kecamatan Kahayan Hilir, Indonesia” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 25 Juli 2025

Moh. Djauhari  
E1501211006



## RINGKASAN

MOH. DJAUHARI. Kelembagaan Sumber Daya Bersama di Bawah Rezim Perhutanan Sosial di Kecamatan Kahayan Hilir, Indonesia. Dibimbing oleh PROF. DR. EFI YULIATI YOVI, S.HUT, M.LIFE.ENV.SC. dan DR. IR. LETI SUNDAWATI, M.SC.F.TROP.

Perhutanan Sosial adalah paradigma pengelolaan sumber daya hutan atau kehutanan baru. Dalam perkembangannya selama kurang lebih 40 tahun di Dunia, konsep kehutanan partisipatif ini masih berupa konsep dan praktik pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Perhutanan Sosial yang tumbuh dan berkembang secara alamiah, yang selaras dengan perkembangan masyarakat kurang mendapat tempat dalam lapangan perubahan sosial yang lebih maju dan progresif. Di Indonesia setelah Perhutanan Sosial menjadi program nasional, dalam 5 tahun belakangan ini Perhutanan Sosial cenderung lebih mundur dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan pendekatan perspektif sosiologis, penelitian dengan lingkup kajian kelembagaan ini menguji dan membandingkan akibat-akibat dari pelaksanaan Hutan Desa di wilayah adat di Kecamatan Kahayan Hilir, di Indonesia. Aspek-aspek kelembagaan yang menjadi sorotan dari kasus Hutan Desa di wilayah adat ini adalah aspek hak dan system penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan, serta menganalisis proses pendefinisian teknis Perhutanan Sosial berdasarkan pengalaman empiris pelakunya, terutama dari proses relasi-relasi antarpelaku Perhutanan Sosial formal dan non-formal dan relasi-relasi dampak pelaksanaan Perhutanan Sosial formal bagi keberadaan dan keberlanjutan praktik Perhutanan Sosial non-formal.

Terdapat kesenjangan antara Perhutanan Sosial sebagai sebuah konsep dan praktik di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan *Grounded Theory* yang menganalisis praktik-praktik Hutan Ulayat dalam rezim Perhutanan Sosial. Penelitian ini menemukan bahwa praktik kelembagaan Hutan Ulayat masih berbasis pada aturan-aturan masyarakat setempat atau adat. Implementasi Hutan Desa di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan strategi bagi masyarakat adat untuk memformalkan Hutan Ulayat mereka. Hal ini memiliki konsekuensi praktis berupa asimilasi (dualitas) hukum dan pertentangan (dualisme) aturan. Konsep dan praktik dualitas ini kemudian membentuk definisi empiris dari Perhutanan Sosial dari bawah (lapangan). Perhutanan Sosial adalah konsep pengelolaan hutan lestari yang perlu menempatkan masyarakat sebagai pusat perubahan dan komunitas yang mengelola sumber daya hutan dengan kekuatan, pengetahuan, dan kearifan mereka secara mandiri.

**Kata kunci:** dualisme aturan, dualitas hukum, hutan ulayat, perhutanan sosial

## SUMMARY

MOH. DJAUHARI. Common Resource Institutions Under the Social Forestry Regime in Sub-district of Kahayan Hilir, Indonesia. Supervised by PROF. DR. EFI YULIATI YOVI, S.HUT, M.LIFE.ENV.SC. of 1<sup>st</sup> SUPERVISOR 1<sup>st</sup>, DR. IR. LETI SUNDAWATI, M.SC.F.TROP. of 2<sup>nd</sup>

Social Forestry represents a new paradigm in forest resource management. Over its approximately 40 years of development worldwide, this participatory forestry concept has largely remained a theoretical framework and a practice focused on empowering communities within and around forests. Despite growing naturally in harmony with community development, Social Forestry has received limited recognition in more advanced fields of social change. In Indonesia, since becoming a national program, Social Forestry has shown a declining trend over the past nine years compared to previous periods. This institutional study adopts a sociological perspective to examine and compare the impacts of Village Forest implementation in customary areas within Kahayan Hilir District, Indonesia. The analysis highlights key institutional aspects, including rights and control systems, utilization and management, while also exploring the technical definition of Social Forestry based on empirical experiences of stakeholders. Special attention is given to the dynamics between formal and non-formal Social Forestry actors, as well as the effects of formal Social Forestry implementation on the sustainability of non-formal practices.

A significant gap exists between Social Forestry as a concept and its practical application in Indonesia. This qualitative research employs grounded theory to analyze customary forest practices within the Social Forestry framework. Findings reveal that customary forest institutions continue to operate based on local community rules. In Kahayan Hilir, Central Kalimantan Province, the Village Forest initiative serves as a strategy for indigenous communities to formalize their customary forests. However, this has led to practical challenges, including legal duality and conflicting regulations. This duality between concept and practice ultimately shapes the empirical definition of Social Forestry "from below" (i.e., field-level implementation). As a sustainable forest management model, Social Forestry must place communities at the center of change—empowering them to independently manage forest resources through their dynamic strengths, knowledge, and wisdom.

**Keywords:** dualistic rules, legal duality, customary forest institutional, social forestry regime.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*

**KELEMBAGAAN SUMBER DAYA BERSAMA  
DI BAWAH REZIM PERHUTANAN SOSIAL  
DI KECAMATAN KAHAYAN HILIR, INDONESIA**

**MOH. DJAUHARI**

Tesis  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister pada  
Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU PENGELOLAAN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2025**



*@Hak cipta milik IPB University*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Tesis:  
1 Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, M.S.

Judul Tesis : Kelembagaan Sumber Daya Bersama di Bawah Rezim Perhutanan Sosial di Kecamatan Kahayan Hilir, Indonesia  
Nama : Moh. Djauhari  
NIM : E1501211006

Disetujui oleh

Pembimbing 1:  
Prof. Dr. Efi Yuliati Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc.

Pembimbing 2:  
Dr. Ir. Leti Sundawati, M.Sc.F.Trop.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
Prof. Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.Sc.  
NIP 196111261986011001

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan:  
Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.S.  
NIP 196501221989031002



Tanggal Ujian: 21 Juli 2025

Tanggal Lulus:

04 AUG 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



University

— Bogor Indonesia

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2022 sampai bulan Maret 2023 ini ialah pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah adat, dengan judul “Kelembagaan Sumber Daya Bersama di Bawah Rezim Perhutanan Sosial di Kecamatan Kahayan Hilir, Indonesia”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pembimbing, Prof. Dr. Efi Yulianti Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc. dan Dr. Ir. Leti Sundawati, M.Sc.F.Trop. yang telah membimbing dan banyak memberi saran. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada moderator seminar Prof. Dr. Ir. Jarwadi Budi Hernowo, M.Sc.F.Trop., pimpinan sidang ujian tesis Prof. Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.Sc. dan penguji luar komisi pembimbing Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, M.S. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Djaelani dan Siti Hasizah, kedua orang tua penulis yang semasa hidupnya mendorong penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana lanjutan, serta kepada istri tercinta Wa Ode Nurlansi dan anak-anak penulis Kfi Rumi Paniti, Kfo Sabilmahna Paniti, Rakanawa Paniti dan Raggapadmi Paniti yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya selama penulis menempuh pendidikan pascasarjana.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, 25 Juli 2025

Moh. Djauhari

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



## @Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## DAFTAR ISI

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| DAFTAR TABEL                      | x  |
| DAFTAR GAMBAR                     | x  |
| I PENDAHULUAN                     | 1  |
| 1.1 Latar Belakang                | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah               | 4  |
| 1.3 Tujuan                        | 5  |
| 1.4 Manfaat                       | 5  |
| 1.5 Ruang Lingkup                 | 5  |
| II TINJAUAN PUSTAKA               | 6  |
| 2.1 Konsep Sumber Daya Bersama    | 6  |
| 2.2 Hak Menguasai Negara          | 6  |
| 2.3 Hak Pemberian Negara          | 7  |
| 2.4 Kerangka Pemikiran            | 7  |
| III METODE                        | 9  |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian   | 9  |
| 3.2 Alat dan Bahan                | 9  |
| 3.3 Pengumpulan dan Analisis Data | 10 |
| IV HASIL DAN PEMBAHASAN           | 18 |
| 4.1 Hasil                         | 18 |
| 4.2 Pembahasan                    | 37 |
| V SIMPULAN DAN SARAN              | 46 |
| 5.1 Simpulan                      | 46 |
| 5.2 Saran                         | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA                    | 47 |
| RIWAYAT HIDUP                     | 50 |



## DAFTAR TABEL

|   |                                                                                                          |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Sumber data, informan/partisipan dan identitas dokumen hasil pengumpulan data                            | 12 |
| 2 | <i>Open coding</i> menemukan <i>theoretical sampling</i>                                                 | 13 |
| 3 | Perbedaan <i>bundle of rights</i> Hutan Desa dan Hutan Ulayat                                            | 39 |
| 4 | Perbedaan Hutan Desa dan Hutan Ulayat berdasarkan desain prinsip kelembagaan                             | 40 |
| 5 | Tataguna lahan-hutan Perhutanan Sosial berdasarkan fungsi kawasan di Kahayan Hilir                       | 41 |
| 6 | Penilaian Hutan Desa dan Hutan Ulayat berdasarkan Tata Pemerintahan Berpusat Masyarakat                  | 42 |
| 7 | Daftar program pemberdayaan dan pendampingan pemerintah dan LSM dalam Perhutanan Sosial di Kahayan Hilir | 44 |

## DAFTAR GAMBAR

|    |                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Alur kerangka teoritis                                                                                                                                                                                                   | 7  |
| 2  | Peta Lokasi penelitian Kecamatan Kahayan Hilir                                                                                                                                                                           | 8  |
| 3  | Prosedur <i>Grounded Theory</i>                                                                                                                                                                                          | 12 |
| 4  | Kode data berdasarkan penghitungan kata terbanyak dari proses verbatim 13 dokumen hasil transkripsi                                                                                                                      | 13 |
| 5  | Jumlah relasi kode kategori dengan 13 dokumen hasil wawancara mendalam dan laporan <i>FGD</i>                                                                                                                            | 14 |
| 6  | Jumlah kode kategori konseptual ( <i>node</i> warna coklat, warna hijau, warna hijau muda), sub-kategori konseptual ( <i>node</i> warna biru dan warna ungu) dan kategori inti ( <i>node</i> warna merah)                | 14 |
| 7  | Hubungan kode kategori konseptual ( <i>node</i> warna hijau, warna hijau muda, warna coklat), kode sub-kategori konseptual ( <i>node</i> warna biru dan warna ungu) dengan kode kategori inti ( <i>node</i> warna merah) | 15 |
| 8  | Relasi antarkategori konseptual, antara kategori konseptual dengan sub-kategori konseptual, dan integrasi kategori inti                                                                                                  | 16 |
| 9  | Persimpangan Saluran Tersier Induk-Eks-PLG atau STI-Eks PLG di Hutan Desa Buntoi                                                                                                                                         | 20 |
| 10 | Peta tumpang-tindih (konflik penguasaan) antara areal Hutan Desa dengan area akses <i>handel</i> di Kahayan Hilir                                                                                                        | 22 |
| 11 | Struktur-fungsional kelembagaan Sistem <i>Handel</i>                                                                                                                                                                     | 24 |
| 12 | Struktur-fungsional kelembagaan Hutan Desa                                                                                                                                                                               | 27 |
| 13 | Peta partisipatif tata guna lahan-hutan di Kecamatan Kahayan Hilir                                                                                                                                                       | 29 |
| 14 | Tiang ( <i>sapundu</i> ) ulin untuk tempat mengikat hewan persembahan di <i>sandung</i>                                                                                                                                  | 30 |
| 15 | Jendela (tabulasi) definisi teknis-empiris Perhutanan Sosial                                                                                                                                                             | 35 |